

ABSTRAK

“Sembilan Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan PBJ di Kementerian PUPR” merupakan kebijakan yang diimplementasikan untuk menangani tingginya *fraud* pengadaan barang/jasa (PBJ). Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak dan kendala dari implementasi kebijakan 9 strategi dalam perspektif tata kelola. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus eksploratif, didukung oleh wawancara semi-terstruktur dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berdampak positif terhadap perbaikan *governance*, *risk management*, dan *compliance* (GRC) di Kementerian PUPR, dibuktikan dengan berbagai pencapaian yang telah dievaluasi oleh pihak eksternal (LKPP, BPKP, KPK). Selain itu, terdapat kendala dalam implementasi meliputi kendala komunikasi, sumber daya manusia dan anggaran, struktur birokrasi, serta kendala lainnya. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian PUPR agar memastikan keberlanjutan kebijakan 9 strategi serta mengelola risiko yang menghambat kelancaran implementasi kebijakan.

Kata kunci: pengadaan barang/jasa (PBJ), *fraud*, kebijakan, tata kelola, GRC, Kementerian PUPR.

“Sembilan Strategi Pencegahan Risiko Penyimpangan PBJ di Kementerian PUPR” is a policy implemented to deal with the high level of public procurement fraud. This study aims to explore the impact and constraints of the 9-strategy policy implementation from a governance perspective. The study used a qualitative approach with an exploratory case study method, supported by semi-structured interviews and document analysis. The results show that the policy implementation has a positive impact on improving governance, risk management, and compliance (GRC) in the Ministry of Ministry of Public Works and Housing, as evidenced by various achievements that have been evaluated by external parties (LKPP, BPKP, KPK). In addition, there are obstacles in implementation including communication constraints, human resources and budgets, bureaucratic structures, and other obstacles. Thus, this study recommends that the Ministry of Ministry of Public Works and Housing ensure the sustainability of the policy strategy and manage risks that hinder the smooth implementation of the policy..

Keywords: *procurement of goods/services (PBJ), fraud, policy, governance, GRC, Ministry of Public Works and Housing.*